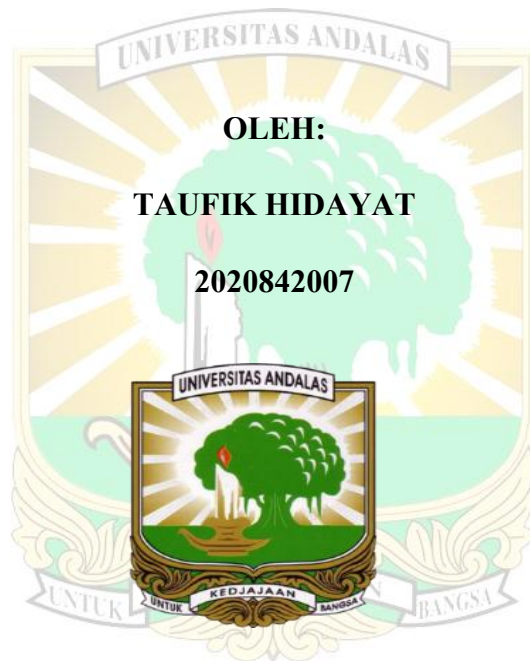


**ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

TESIS

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas***



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Ajakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk “Mencintai Produk Lokal” telah melahirkan banyak kebijakan yang terkait dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu: Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produksi dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan surat edaran Mendikbudristek nomor 18 tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tingkat keberhasilan dari kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbudristek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, analisis dokumen serta observasi langsung terhadap proses implementasi kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk lokal sudah terealisasi secara baik, dimana Kementerian/Lembaga yang mempunyai pagu anggaran belanja barang/jasa terbesar, nilai realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) terhadap nilai komitmen sebesar 92,34%. Penerapan dari kebijakan TKDN sudah tersampaikan secara baik, mulai dari implementor sampai dengan target/kelompok sasaran. Kemendikbudristek juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN dengan melaksanakan pengalihan belanja dari produk elektronik impor ke produk dalam negeri sebesar Rp.1.277 T. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan TKDN, termasuk keterbatasan kapasitas produk lokal, kualitas produk dalam negeri, serta pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi TKDN oleh para pelaku pengadaan. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, serta sosialisasi yang lebih massal dan pelatihan yang lebih intensif serta pengembangan penelitian terkait peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri. Penelitian ini merekomendasikan pengurangan dari persentase 40% TKDN yang harus ada, peningkatan koordinasi antara pemerintah dan industri, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan TKDN untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Produk Dalam Negeri (PDN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ABSTRACT

The invitation of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo to "Love Local Products" has given birth to many policies related to the Use of Domestic Products, namely: Presidential Instruction number 2 of 2022 concerning the acceleration of the increase in domestic production and products of micro, small and cooperative enterprises in order to succeed the national movement of proudly made in Indonesia in the implementation of government procurement of goods/services and circular letter of the Minister of Education, Culture, Research and Technology number 18 of 2022 concerning the use of domestic products in the procurement of goods/services in the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This study aims to determine how the implementation and success rate of the Domestic Component Level (TKDN) policy in the General Bureau and Procurement of Goods and Services of Kemendikbudristek. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant officials, document analysis and direct observation of the policy implementation process related to the Domestic Component Level (TKDN). The results showed that the use of local products has been well realised, where the Ministry/Institution that has the largest budget ceiling for goods/services expenditure has a Domestic Product (PDN) realisation value against the commitment value of 92.34%. The implementation of the TKDN policy has been well conveyed, starting from the implementor to the target/target group. The Ministry of Education and Culture also provided support for the implementation of the TKDN policy by shifting spending from imported electronic products to domestic products amounting to Rp.1,277 T. The study also identified several key challenges in the implementation of TKDN, including limited capacity of local products, quality of domestic products, and understanding and compliance with TKDN regulations by procurement actors. Efforts are needed to increase the capacity and quality of domestic products, as well as more massive socialisation and more intensive training and research development related to increasing the capacity and quality of domestic products. This study recommends a reduction from the 40% TKDN percentage that must be in place, increased coordination between government and industry, and periodic evaluation of the TKDN policy to ensure its effectiveness in supporting national economic development.

Keywords: Domestic Component Level (TKDN), Government Procurement, Domestic Products, Ministry of Education, Culture, Research and Technology